

PEMETAAN PELAPORAN KEBERLANJUTAN PERUSAHAAN MANUFAKTUR DI BERBAGAI NEGARA DAN DAMPAKNYA TERHADAP NILAI PERUSAHAAN

Bobby W. Saputra

Program Studi Akuntansi
Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Harapan Bangsa
Jalan Dipatiukur No.80-84 Bandung, 40132
Email: bobby@ithb.ac.id

Hanryono

Program Studi Akuntansi
Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Harapan Bangsa
Jalan Dipatiukur No.80-84 Bandung, 40132
Email: hanryono@ithb.ac.id

Elisabeth S. Manalu

Program Studi Akuntansi
Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Harapan Bangsa
Jalan Dipatiukur No.80-84 Bandung, 40132
Email: elisabeth@ithb.ac.id

ABSTRACT

Sustainability Reporting (SR) is a process to disclose reports related to economic, environment, and social. Sustainability reporting is the one of important factor for sustainability development. The sample use purposive criteria from manufacturing companies in Indonesia Stock Exchange, Shanghai Stock Exchange, and Bombay Stock Exchange. This research show that independent committee and institutional ownership have no significant influence toward to sustainability reporting because controlling and monitoring function not working properly in the companies. Independent committee, institutional ownership have not significant influence toward to sustainability reporting disclosure. It caused Indonesia, China, and India have different situation. Based on contingency theory, different situation and condition have different environment and culture. This research shows that culture is one of important factor cause towards to sustainability reporting disclosure.

Keywords: *Sustainability reporting, independent committee, institutional ownership, culture.*

ABSTRAK

Sustainability Reporting (SR) merupakan salah satu bentuk kepedulian terhadap aspek lingkungan dan sosial. SR akan berdampak pada keberlanjutan pembangunan (*sustainability development*) jangka panjang bagi perusahaan. Peran komisaris independen dan struktur kepemilikan institusional terhadap pengungkapan SR menjadi faktor yang penting. Namun demikian keberadaan komisaris independen dan kepemilikan institusional tidak berpengaruh terhadap pengungkapan SR karena fungsi pengawasan dan pengendalian yang belum berjalan optimal untuk memastikan pengungkapan SR. Tidak adanya pengaruh komisaris independen, kepemilikan institusional dapat disebabkan berbagai faktor. Teori kontingensi menyatakan bahwa setiap situasi yang berbeda akan menghasilkan kondisi yang berbeda. Budaya merupakan salah satu faktor kontingensi bagi perusahaan. Hasil yang bervariasi untuk pengujian masing-masing negara mengindikasikan bahwa budaya memang menjadi faktor penting dalam pengungkapan SR.

Kata kunci: Laporan keberlanjutan, komisaris independen, kepemilikan institusional, budaya.

Latar Belakang

Kebutuhan masyarakat akan laporan komprehensif mengenai aktivitas bisnis perusahaan didasari banyaknya kasus yang terkait dengan pelaporan keuangan, isu lingkungan dan sosial. Pelaporan keuangan digunakan sebagai salah satu media menyampaikan informasi kepada publik. Namun demikian, seringkali pelaporan keuangan disalahgunakan untuk kepentingan perusahaan, yaitu dengan melaporkan kondisi keuangan bukan kondisi sebenarnya. Masyarakat seringkali tidak mengetahui window dressing yang dilakukan perusahaan, berdampak pada pengambilan keputusan yang salah. Selain pertimbangan manipulasi laporan keuangan, isu lingkungan dan sosial menjadi hal yang harus diperhatikan. Berbagai kasus yang terjadi terkait lingkungan dan sosial berdampak pada masyarakat luas di Indonesia. Pengungkapan mengenai aktivitas bisnis yang terkait dengan lingkungan dan sosial menjadi penting bagi masyarakat. Ketidaktahuan masyarakat akan aktivitas bisnis dan pengelolaan bisnis perusahaan menjadikan masyarakat salah dalam melakukan penilaian dan pengambilan keputusan. Keputusan yang salah akan berdampak pada berbagai aspek baik ekonomi, lingkungan, dan sosial. Perusahaan dengan tingkat kepedulian rendah namun mendapatkan banyak manfaat dari masyarakat akan membuat lingkungan dan sosial menjadi terpengaruh dan berdampak buruk bagi kelangsungan lingkungan dan sosial.

Ketika perusahaan berfokus pada pengungkapan SR akan membantu pembangunan keberlanjutan di negaranya. Pembangunan berkelanjutan berkaitan dengan masa depan aktivitas usaha di perusahaan yang memiliki kontribusi terhadap lingkungan dan sosial. Kepedulian terhadap aspek lingkungan dan sosial akan menjadikan lingkungan mampu bertahan lama dan mampu dimanfaatkan bagi perusahaan dan masyarakat. Pada negara-negara berkembang, pengungkapan aspek lingkungan dan sosial belum banyak dilakukan mengingat bahwa karakteristik masyarakat Timur lebih memiliki kecenderungan tertutup jika dibandingkan dengan masyarakat Barat. Tidak dapat dipungkiri bahwa, masyarakat Timur yang cenderung tertutup kurang memiliki kesadaran akan pentingnya pengungkapan SR, sehingga masyarakat Timur relatif enggan untuk mengungkapkan informasi SR dalam

laporan setiap tahunnya. Kurangnya kesadaran karena negara berkembang relatif berfokus pada pembenahan aspek ekonomi dibandingkan aspek lingkungan dan sosial. Perusahaan pada negara berkembang berfokus bagaimana peningkatan profitabilitas dibandingkan dengan memikirkan manfaat jangka panjang pengungkapan aspek lingkungan dan sosial. Padahal manfaat yang didapatkan bagi perusahaan dan masyarakat sangat besar. Bagi perusahaan dapat memberikan sinyal eksistensi dan kemapanan serta tanggung jawab perusahaan. Sedangkan bagi masyarakat mampu mengawasi dan mengetahui informasi mengenai kondisi riil dan menyeluruh dari perusahaan tersebut.

Cina, India dan Indonesia merupakan tiga negara dengan kesempatan dan perkembangan ekonomi yang sangat besar di kawasan Asia, ketiga negara ini melakukan usaha peningkatan program “*low carbon consumer behavior*” dalam kaitannya dengan tanggung jawab lingkungan karena lebih dari 40% *urban consumer* berada di Cina dan India, atas dasar inilah perusahaan-perusahaan diperhadapkan dengan tanggung jawab sosialnya terhadap pemangku kepentingan (Kering.com, 2013). Cina dan India menunjukkan perkembangan pasar yang baik sebagai negara berkembang dalam *emerging market* dan mencapai *top-scoring consumer of the 2014 Greendex* (National Geographic, 2014; Sihombing, 2013; WFE, 2009; Setneg, 2007; Indonesia Stock Exchange, 2010; SSM, 2015; Suttipun & Stanton, 2012).

Penerbitan SR ketiga negara yang rendah menunjukkan rendahnya transparansi informasi perusahaan di masing-masing negara. Negara Indonesia, Cina, dan India merupakan negara-negara di kawasan Asia, dimana kawasan Asia merupakan bagian dari masyarakat Timur yang memiliki kecenderungan tertutup terhadap informasi, konservatif, dan memiliki rasa kekeluargaan yang tinggi (Williams, 1999; Xiao, Gao, Heravi, & Cheung, 2005). Adanya regulasi dari pemerintah dan pasar modal, tidak memberikan dampak signifikan pada pengungkapan SR perusahaan. Walaupun ketiga negara merupakan negara di kawasan Asia, namun terdapat perbedaan budaya terkait pengungkapan antara Indonesia, Cina, dan India.

Peranan komisaris independen memiliki dampak yang kuat atas pengungkapan sosial perusahaan. Semakin banyak komposisi komisaris independen maka semakin kuat pula pengawasan perusahaan dalam hal pengungkapan informasi kepada publik. Sehingga pengawasan akan memengaruhi pengungkapan SR. Dalam mekanisme tata kelola perusahaan, mayoritas direktur komisaris independen akan memberikan kontrol dan pengungkapan informasi yang berkualitas dalam rangka melindungi kepentingan pemegang saham, sehingga semakin banyak komposisi komisaris independen, semakin tinggi pula tingkat pengungkapan informasi perusahaan (Al-Janadi, Rahman, & Omar, 2013).

Berdasarkan uraian diatas, maka suatu rumusan masalah yang dapat dibahas adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaruh komisaris independen terhadap pengungkapan laporan keberlanjutan di perusahaan manufaktur di negara Indonesia, India, dan Cina?
2. Bagaimana pengaruh kepemilikan institusional terhadap pengungkapan laporan keberlanjutan di perusahaan manufaktur di negara Indonesia, India, dan Cina?

Teori Sinyal (*Signaling Theory*)

Terkait dengan teori sebelumnya yaitu teori keagenan, teori sinyal hadir untuk meminimalkan terjadinya asimetri informasi dengan cara mengirimkan sinyal-sinyal. Teori

sinyal mendorong perusahaan tentang bagaimana seharusnya sebuah perusahaan memberikan sinyal kepada pengguna laporan perusahaan. Sinyal yang dimaksud adalah berupa informasi mengenai apa yang sudah dilakukan oleh manajemen untuk merealisasikan keinginan pemangku kepentingan. Sinyal dapat berupa promosi atau informasi lain yang menyatakan bahwa perusahaan tersebut lebih baik dan memiliki prospek baik dibandingkan kompetitornya. Pengungkapan informasi SR dapat menjadi sinyal positif bagi publik mengenai perusahaan. Kepedulian perusahaan terhadap aspek lingkungan dan sosial menjadi kabar baik kepada publik bahwa perusahaan telah menunjukkan kemapanan, kedewasaan, dan bertanggung jawab. Teori sinyal menjelaskan bahwa pemberian sinyal dilakukan oleh manajer untuk mengurangi asimetri informasi yang ditemukan dalam teori keagenan sebelumnya. Keputusan para investor, akan dipengaruhi oleh kualitas informasi atau laporan yang diungkapkan perusahaan (Zhao, Katchova, & Barry, 2004).

Teori Keagenan (*Agency Theory*)

Teori keagenan ini merupakan teori yang cukup populer di bidang akuntansi dan manajemen, karena membahas tentang kepentingan masing-masing pihak yang bertentangan dalam menjalankan atau mengelola sebuah organisasi. Perusahaan dalam aktivitasnya memilih untuk memisahkan antara fungsi kepemilikan dengan pengelolaan, hal ini karena masing-masing pihak memiliki kepentingan sendiri yang bertentangan dan cenderung mementingkan keuntungannya sendiri. Atas dasar inilah manajemen melakukan sebuah kesepakatan dengan cara memisahkan proporsi hak maupun kewajiban masing-masing pihak.

Teori Kontingensi (*Contingency Theory*)

Menurut Islam & Hu (2012) teori kontingensi merupakan teori yang menggunakan pendekatan perilaku organisasi. Teori ini menyatakan bahwa terdapat berbagai faktor kontingensi yang dapat memengaruhi organisasi, dalam hal ini adalah perusahaan. Faktor kontingensi seperti teknologi dan budaya dan faktor lingkungan eksternal menjadi penentu desain dan fungsi perusahaan dalam menjalankan aktivitas bisnisnya. Lebih lanjut, Reid & Smith (2000), Chenhall (2003), dan Woods (2009) menyatakan bahwa setiap perusahaan memiliki faktor lingkungan eksternal yang berbeda. Kondisi atau situasi lingkungan berpengaruh terhadap perusahaan dalam menjalankan aktivitasnya.

Laporan Keberlanjutan (*Sustainability Reporting*)

Manfaat SR bukan hanya untuk investor melainkan seluruh pihak yang terkait dengan perusahaan, baik investor, perusahaan itu sendiri hingga seluruh kelompok kepentingan yang terkait dengan perusahaan. Adapun manfaat yang diperoleh jika melakukan SR adalah:

1. Adanya laporan maka memungkinkan perusahaan untuk melihat dan mengidentifikasi peluang dalam peningkatan aktivitas operasinya, sehingga akan terhindar dari risiko yang mungkin timbul dalam jangka panjang.
2. Salah satu nilai yang dapat dibentuk dan ditingkatkan perusahaan adalah dengan mengelola dampak keberlanjutan.

3. Pihak-pihak terkait mendapatkan wawasan serta pengetahuan penting tentang kinerja perusahaan sehingga dapat melihat potensi investasi seoptimal mungkin.
4. SR dapat membangun dan mempertahankan kepercayaan pemangku kepentingan lewat informasi yang ada sesuai dengan standar agar meminimalkan risiko dampak negatif bagi lingkungan dan sosial.

Indikator GRI 4.0 menurut GRI (2013) terdiri dari aspek ekonomi, lingkungan dan sosial, yaitu:

1. Aspek ekonomi
Aspek ini berkaitan dengan dampak organisasi terhadap keadaan ekonomi bagi pemangku kepentingannya, dan terhadap sistem ekonomi di tingkat lokal, nasional, dan global. Kategori Ekonomi menggambarkan arus modal di antara pemangku kepentingan yang berbeda, dan dampak ekonomi utama dari organisasi di seluruh lapisan masyarakat.
2. Aspek lingkungan
Aspek ini berkaitan dengan dampak organisasi pada sistem alam yang hidup dan tidak hidup, termasuk tanah, udara, air, dan ekosistem. Kategori Lingkungan meliputi dampak yang terkait dengan input (seperti energi dan air) dan output (seperti: emisi, efluen dan limbah). Termasuk juga keanekaragaman hayati, transportasi, dan dampak yang berkaitan dengan produk dan jasa, serta kepatuhan dan biaya lingkungan.
3. Aspek sosial
Aspek ini membahas dampak yang dimiliki organisasi terhadap sistem sosial di mana organisasi beroperasi. Aspek ini membahas mengenai praktik ketenagakerjaan dan kenyamanan bekerja; hak asasi manusia; masyarakat; dan tanggung jawab atas produk. Aspek-aspek didasarkan pada standar universal yang diakui secara internasional yang relevan.

Komisaris Independen (*Independent Committee*)

Jumlah komisaris independen menjadi salah satu faktor penentu dalam pengungkapan yang dilakukan perusahaan. Beberapa penelitian meyakini bahwa semakin banyak jumlah komisaris independen dalam sebuah perusahaan, semakin ia akan bersifat transparansi karena tidak memihak dan menjunjung prinsip dasar GCG yaitu transparansi (Rouf, 2011). Jumlah komisaris independen dinyatakan mampu memengaruhi tingkat pengungkapan perusahaan. Semakin besar ukuran komisaris independen, semakin kuat juga pengendalian aktivitas perusahaan. Peran komisaris independen memengaruhi keputusan-keputusan yang akan dibuat dalam sebuah organisasi dan kaitannya dengan transparansi informasi kepada publik (Janggu, Darus, Zaen, & Sawani, 2014; Ali & Atan, 2013).

Kepemilikan Institusional (*Institutional Ownership*)

Struktur kepemilikan merupakan mekanisme menyelaraskan kepentingan pemegang saham dan manajer (Eng & Mak, 2003; Chau & Gray, 2002; Haniffah & Cooke, 2005). Dalam perusahaan publik, kepemilikan saham akan diterbitkan kepada umum dan menjadi

perusahaan publik melalui modal yang disetorkan investor. Struktur kepemilikan dalam organisasi menjadi penentu bagaimana perusahaan ini menjalankan strategi, karena struktur kepemilikan menyatakan siapa saja yang memiliki hak dalam perusahaan dan ikut serta dalam mendorong pengambilan keputusan. Struktur kepemilikan dalam perusahaan dalam bentuk saham dimiliki oleh publik baik dalam bentuk institusi maupun pihak diluar institusi (misalnya perorangan). Dalam SR, struktur kepemilikan merupakan konten yang wajib dipublikasikan kepada publik untuk melihat komposisi kepemilikan perusahaan berdasarkan modal yang ada (Sufian & Zahan, 2013; Barnea & Rubin, 2006).

Budaya (*Culture*)

Budaya individu di negara tertentu sangat tertutup namun ada juga yang menjunjung tinggi prinsip transparansi dalam bisnis. Beberapa negara menitikberatkan pada transparansi proses bisnis, sehingga jika perusahaan yang dipimpin oleh direksi lokal cenderung melakukan SR kepada publik (Haniffa, 2002; Haniffah & Cooke, 2005). Budaya yang terbentuk di masing-masing negara berbeda-beda, Hofstede dalam penelitiannya menilai bahwa ada beberapa ukuran yang dapat melihat bagaimana budaya dalam suatu negara, terkait dengan gender, kekuasaan, orientasi, sifat, dan sebagainya. Budaya yang terbentuk tersebut akan memengaruhi bagaimana perusahaan dalam hal ini manajemen mengambil keputusan termasuk dalam keputusan pengungkapan informasi perusahaan kepada publik.

Objek Penelitian

Objek dalam penelitian ini adalah *sustainability reporting*, komisaris independen, kepemilikan institusional. Sedangkan unit analisis dalam penelitian ini adalah laporan keuangan, laporan tahunan, dan SR dari perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek di Indonesia, *Shanghai Stock Exchange*, dan *Bombay Stock Exchange*

Metode Penelitian dan Sumber Data

Penelitian ini menggunakan data sekunder. Adapun data sekunder didapatkan dari laporan keuangan, laporan tahunan, *sustainability reporting* perusahaan yang telah ditentukan kriteria lebih lanjut. Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif verifikatif.

Analisa dan Pembahasan

Analisis pada bagian ini meliputi analisis perusahaan berdasarkan subsektor manufaktur baik di Indonesia, Cina, dan India serta analisis masing-masing variable. Nilai pengungkapan informasi SR di perusahaan manufaktur negara Indonesia lebih baik dibandingkan dengan perusahaan manufaktur di negara India, dan Cina. Pengungkapan yang dilakukan perusahaan di Indonesia mengindikasikan bahwa tingkat kesadaran perusahaan di Indonesia lebih baik jika dibandingkan dengan perusahaan manufaktur di negara India dan Cina. Perusahaan manufaktur di Cina memiliki nilai rata-rata hanya mencapai 51%, hal ini menyatakan bahwa pengungkapan informasi SR di perusahaan manufaktur negara Cina paling rendah. Keberadaan komisaris independen ternyata belum mampu menjalankan

fungsi pengawasan terhadap pengungkapan informasi SR. Karakteristik perusahaan di negara Cina yang dimiliki mayoritas oleh keluarga atau kerabat menjadi salah satu alasan mengapa pengungkapan informasi SR tergolong rendah. Perusahaan dengan karakteristik tersebut memiliki tingkat kesadaran yang rendah dalam pengungkapan informasi SR.

Pada bagian ini dilakukan pengujian untuk memilih model yang tepat untuk masing-masing model regresi. Pengujian dilakukan dengan uji *Chow* untuk melihat model mana yang tepat antara model *common effect* dan model *fixed effect*. Kemudian uji *Hausman* untuk melihat model mana yang tepat antara model *fixed effect* dan model *random effect*. Jika didapatkan hasil yang berbeda pada kedua uji sebelumnya, akan dilakukan uji *Lagrange Multiplier* untuk melihat model mana yang tepat antara model *common effect* dan model *random effect*. Berdasarkan pengujian perusahaan manufaktur di masing-masing negara dan gabungan ketiga negara, didapatkan bahwa untuk masing-masing perusahaan manufaktur, model yang tepat adalah *fixed effect model*. Sedangkan model yang tepat untuk gabungan perusahaan manufaktur di ketiga negara adalah *random effect model*. Baik *fixed effect model* dan *random effect model* menyatakan bahwa terdapat perbedaan dalam pengamatan yang dilakukan pada berbagai perusahaan dalam setiap tahunnya.

Tabel I: Perbandingan Pengujian Hipotesis Setiap Negara

Hipotesis	Keterangan	Indonesia	Cina	India
1	Komisaris independen berpengaruh signifikan terhadap <i>sustainability reporting</i>	Ditolak	Ditolak	Ditolak
2	Kepemilikan institusional berpengaruh signifikan terhadap <i>sustainability reporting</i>	Diterima	Ditolak	Ditolak

Sumber: Data diolah, 2017

Berdasarkan hasil pengolahan dan analisis data dalam penelitian ini didapatkan hasil yang beragam antara variabel independen terhadap variabel dependen. Pengungkapan informasi SR ternyata tidak dipengaruhi oleh beberapa variabel independen, baik perusahaan manufaktur di ketiga negara maupun masing-masing negara. SR merupakan pengungkapan informasi terkait aspek ekonomi, lingkungan, dan sosial. SR berkembang seiring dengan kebutuhan pemangku kepentingan terhadap informasi yang ada di perusahaan. Pemangku kepentingan menyadari bahwa kinerja ekonomi perusahaan tidak cukup dijadikan dasar untuk menilai perusahaan secara keseluruhan. Aspek ekonomi merupakan hasil kinerja jangka pendek yang telah terjadi. Para pemangku kepentingan membutuhkan aspek lingkungan dan sosial perusahaan untuk menilai perusahaan secara jangka panjang. Selain itu, isu terkait lingkungan dan sosial berdampak pula pada aspek ekonomi, menjadikan pemangku kepentingan menyadari bahwa aspek lingkungan dan sosial merupakan hal yang penting. Berdasarkan teori sinyal, SR bermanfaat untuk memberikan sinyal positif bahwa perusahaan telah mapan dan bertanggung jawab. Hal ini membuat perusahaan mampu berfokus pada aspek jangka panjang, seperti: lingkungan dan sosial. Saat ini, perhatian terhadap aspek lingkungan dan sosial bukan lagi kerelaan perusahaan melakukan hal tersebut, tetapi kebutuhan akan pentingnya menciptakan nilai demi kelangsungan hidup perusahaan, termasuk para pemangku kepentingan. Pola pikir yang matang ditunjukkan dengan kemampuan berpikir jangka panjang dan bukan hanya untuk kepentingan sekelompok atau individu tertentu saja.

Hasil ini menunjukkan bahwa pengungkapan informasi SR belum berjalan dengan baik. Kesadaran perusahaan akan pentingnya aspek lingkungan dan sosial belum terlihat nyata. Ketiga negara merupakan negara berkembang yang masih berfokus pada aspek ekonomi dalam rangka meningkatkan kemampuan ekonomi negaranya masing-masing. Berdasarkan teori keagenan, komisaris independen dan kepemilikan institusional merupakan bentuk pengendalian untuk meminimalkan ketidaksimbangan informasi. Kedua variabel tersebut, memberikan pengawasan terhadap pengungkapan informasi SR di perusahaan. Namun dari hasil pengujian didapatkan bahwa komisaris independen dan kepemilikan institusional tidak berpengaruh signifikan terhadap pengungkapan SR. Berdasarkan teori keagenan, komisaris independen dan kepemilikan institusional merupakan bentuk pengendalian dan transparansi perusahaan terhadap pemangku kepentingan. Ternyata komisaris independen dan kepemilikan institusional belum mampu memberikan pengendalian terhadap pengungkapan informasi SR. Maka dari itu, pengendalian dan peran dari komisaris independen dan kepemilikan institusional tidak berjalan baik, dan berdampak pada pengungkapan informasi SR yang rendah.

Variabel komisaris independen pada masing-masing negara didapati tidak berpengaruh signifikan terhadap pengungkapan SR. Fungsi pengawasan dari komisaris independen sebagai bentuk pengendalian untuk meminimalkan masalah keagenan, tidak berjalan dengan baik. Terdapat beberapa faktor yang dapat menyebabkan tidak efektifnya fungsi dan peranan komisaris independen di perusahaan, yaitu: proses pemilihan yang tidak transparan, pengetahuan komisaris independen, dan budaya individu yang terlibat di perusahaan.

Lain halnya dengan variabel kepemilikan institusional, pada negara Cina dan India kepemilikan institusional tidak berpengaruh signifikan terhadap pengungkapan SR. Hal ini dapat disebabkan kepemilikan institusi pada kedua negara merupakan kepemilikan yang merepresentasikan beberapa pemilik atau investor saja. Berdasarkan teori keagenan, kepemilikan institusional seharusnya menjadi pengendalian terhadap pengungkapan informasi SR bagi kepentingan pemangku kepentingan. Karena kepemilikan institusional merupakan representasi dari beberapa investor saja, maka dari itu kecenderungan untuk mementingkan kepentingan investor secara individu lebih menonjol dibandingkan kepentingan pemangku kepentingan. Kepentingan investor secara individu yang berbeda dengan pemangku kepentingan menyebabkan rendahnya pengungkapan informasi SR. Sedangkan kepemilikan institusional negara Indonesia berpengaruh signifikan terhadap pengungkapan informasi SR. Hal ini karena maraknya kasus yang terjadi di Indonesia terkait dengan isu lingkungan dan sosial. Kedua isu ini merupakan isu sensitif bagi pemangku kepentingan. Institusi sebagai pemilik perusahaan menyadari akan pentingnya transparansi atau keterbukaan kepada pemangku kepentingan. Transparansi dilakukan dengan pengungkapan informasi SR kepada pemangku kepentingan. Pengungkapan aspek lingkungan dan sosial merupakan bentuk sinyal bahwa perusahaan berpikir untuk masa mendatang, dan berdampak pada kepercayaan publik terhadap kinerja jangka panjang perusahaan.

Pengujian dilakukan pada perusahaan manufaktur di ketiga negara dan masing-masing negara. Pengujian pada masing-masing negara menghasilkan hasil yang beragam baik di Indonesia, Cina, dan India. Hal ini menunjukkan bahwa pada masing-masing negara terdapat faktor-faktor berbeda yang dapat memengaruhi pengungkapan SR. Perbedaan pada

masing-masing negara sejalan dengan teori kontingensi yang menyatakan bahwa negara berbeda akan memiliki kondisi yang berbeda pula. Pengungkapan SR sebagai bagian dari teori pemangku kepentingan, dimana tidak hanya berfokus ada aspek ekonomi saja tetapi juga aspek lingkungan dan sosial yang berhubungan dengan perusahaan. Pengungkapan informasi SR pula akan membantu proses transparansi kepada pemangku kepentingan dalam rangka meminimalkan ketidakseimbangan informasi, sekaligus memberikan sinyal tanggung jawab, kedewasaan, dan kemandirian perusahaan. Hasil pengujian ini mampu melihat variabel mana saja yang berpengaruh kepada perusahaan manufaktur di ketiga negara sebagai perwakilan kawasan Asia, dimana ketiga negara memiliki kriteria yang sama.

Hasil yang sebaliknya ditunjukkan oleh perusahaan manufaktur di negara India. Dari hasil pengujian hanya komisaris independen dan kepemilikan institusional yang tidak berpengaruh terhadap pengungkapan informasi SR. Dari tingkat pengungkapan informasi SR dapat terlihat adanya kesadaran individu dalam perusahaan akan pengungkapan informasi SR. Pengungkapan informasi SR perlu keterlibatan dan kesadaran serta inisiatif dari berbagai pihak, seperti: perusahaan, investor, dan pemerintah. Pengungkapan informasi SR merupakan bentuk kepedulian terhadap pemangku kepentingan, pengendalian, dan sinyal perusahaan bagi pemangku kepentingan. Pengungkapan informasi SR dapat memberikan kontribusi dalam pembangunan keberlanjutan (*sustainability development*) bagi sebuah negara. Kontribusi perusahaan di negara Indonesia, Cina, dan India dapat meningkatkan kesadaran terhadap pengungkapan informasi SR. Pembangunan keberlanjutan (*sustainability development*) perlu dilakukan sejak dini dan berdampak jangka panjang terhadap kelangsungan hidup negara dan juga eksistensi perusahaan. Pengungkapan informasi SR dapat memberikan sinyal kepada pemangku kepentingan bahwa perusahaan telah mapan dan mampu melaksanakan tanggung jawabnya terkait aspek lingkungan dan sosial. Perbedaan hasil pengujian pada masing-masing negara menunjukkan bahwa setiap negara dengan kondisi berbeda, mengakibatkan variabel yang berpengaruh terhadap pengungkapan informasi SR berbeda pula.

Kesimpulan

Berdasarkan analisa yang telah dilakukan, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Komisaris independen tidak berpengaruh signifikan terhadap pengungkapan SR pada analisis perusahaan manufaktur di ketiga negara. Hasil serupa ditunjukkan pada analisis lebih lanjut yang dilakukan untuk masing-masing negara. Walaupun proporsi telah memadai dan sesuai aturan masing-masing negara, ternyata belum mampu mendorong pengungkapan informasi SR. Komisaris independen di perusahaan manufaktur di ketiga negara telah memenuhi ketentuan regulasi masing-masing negara dengan persentase lebih dari 30%, namun demikian peran komisaris independen belum dapat menjadi perwakilan pemangku kepentingan dalam rangka pengungkapan informasi SR yang dapat memberikan gambaran menyeluruh dari kondisi perusahaan.
2. Kepemilikan institusional tidak berpengaruh signifikan terhadap pengungkapan SR hanya pada gabungan perusahaan manufaktur di ketiga negara. Sedangkan untuk negara Indonesia, ditemukan bahwa kepemilikan institusional berpengaruh terhadap pengungkapan informasi SR. Cina dan India tidak berpengaruh signifikan terhadap pengungkapan SR. Hasil ini menyatakan bahwa ketiga negara sebagai sebuah kesatuan yang memiliki kesamaan, sebenarnya memiliki perbedaan. Perbedaan dapat terlihat jelas pada pengujian untuk masing-masing negara. Hal ini disebabkan kecenderungan

pengambilan keputusan di perusahaan yang bersifat seragam. Situasi di Indonesia yang rentan terhadap kasus lingkungan dan sosial mendorong institusi yang memiliki perusahaan mendorong pengungkapan SR untuk meningkatkan kepercayaan pemangku kepentingan. Secara keseluruhan perusahaan manufaktur di ketiga negara menunjukkan bahwa kepemilikan institusional belum mampu memberikan pengaruh terhadap pengungkapan informasi SR. Dominasi persentase kepemilikan institusional tidak mampu memberikan kontribusi dan mengendalikan perusahaan untuk mengungkapkan informasi SR.

Saran

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, maka ada beberapa saran yang dapat diberikan, sebagai berikut:

1. Dari hasil penelitian didapatkan bahwa masih sangat sedikit perusahaan yang mengungkapkan SR dalam laporan yang diterbitkan tahunan. Pengungkapan SR dapat memberikan gambaran utuh mengenai kondisi atau situasi perusahaan dari berbagai aspek, yaitu: ekonomi, lingkungan, dan sosial. Hal ini akan membantu memberikan gambaran bagi investor dalam mengambil keputusan. Komisaris independen memegang peranan penting dalam fungsi pengawasan di perusahaan. Perusahaan diharapkan mampu melaksanakan proses pemilihan komisaris sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan. Perusahaan memastikan pengetahuan komisaris independen dalam melakukan fungsi pengawasan di perusahaan.
2. Kepemilikan institusional merupakan cerminan dari kepemilikan mayoritas dalam perusahaan. Institusi yang memiliki perusahaan harus mampu memberikan pengaruh pada perusahaan dalam pengungkapan SR. Lebih lanjut, pengungkapan SR bukan hanya dilakukan sebagai salah satu syarat untuk memberikan nilai tambah dan juga kepatuhan pada regulasi saja. Perusahaan perlu menyadari bahwa pengungkapan SR, merupakan investasi jangka panjang perusahaan dalam rangka meningkatkan nilai perusahaan di masa mendatang.
3. Investor perlu menyadari bahwa aspek lingkungan dan sosial berdampak jangka panjang terhadap keberlangsungan usaha. Investor diharapkan mampu menyadari bahwa perusahaan yang telah melakukan pengungkapan informasi SR merupakan perusahaan yang matang dan bertanggung jawab tidak hanya pada kelangsungan hidup perusahaan tetapi juga dampak aktivitas perusahaan terhadap lingkungan dan masyarakat sekitar.

DAFTAR PUSTAKA

- Ali, W., & Rizwan, M. (2013). Factors Influencing Corporate Social and Environmental Disclosure (CSED) Practices in the Developing Countries: An Institutional Theoretical Perspective. *International Journal of Asian Social Science*, 590-609.
- Al-Janadi, Y., Rahman, R. A., & Omar, N. (2013). Corporate Governance Mechanisms and Voluntary Disclosure in Saudi Arabia. *Research Journal of Finance and Accounting*, 25-36.
- Barnea, & Rubin. (2006). Corporate Social Responsibility as a Conflict between Shareholders. *Social Sciences and Humanities Research Council of Canada*.

- Bayoud, Kavanagh, & Slaughter. (2012). Factors Influencing Levels of Corporate Social Responsibility Disclosure by Libyan Firms: A Mixed Study. *International Journal of Economics and Finance* , 4, 13-29.
- Chau, G. K., & Gray, S. J. (2002). Ownership Structure and Corporate Voluntary Disclosure in Hong Kong and Singapore. *The International Journal of Accounting* Vol. 37 No. 2, 247-264.
- Eng, L. L., & Mak, Y. T. (2003). Corporate Governance and Voluntary Disclosure. *Journal of Accounting and Public Policy* Vol. 22 No. 4, 325-345.
- Global Reporting Initiative. (2014). <https://www.globalreporting.org/information/sustainability-reporting/Pages/default.aspx>. Retrieved May 2015, from Global Reporting Initiative: www.globalreporting.org
- Global Reporting Initiatives. (2013). *G4 Sustainability Reporting Guidelines*. Netherland: Global Reporting Initiative.
- Haniffa, R. (2002). Culture, Corporate Governance and Disclosure in Malaysia Corporations. *Abacus*, 38.
- Haniffah, & Cooke. (2005). The impact of culture and governance on corporate social reporting. *Journal of Accounting and Public Policy*, 391-430.
- Indonesia Stock Exchange. (2010). *Annual Report 2010*. Jakarta: IDX.
- Janggu, T., Darus, F., Zaen , M. M., & Sawani, Y. (2014). Does good corporate governance lead to better sustainability reporting? an analysis using structural equation modeling. *Procedia-Social and Behavioral Sciences*, 138-145.
- Kering.com. (2013). Redefining Sustainability in Asia. China.
- National Geographic Society;. (2015). Causes of Global Warming. United States of America.
- National Geographic. (2014). *National Geographic* . Retrieved Nov November, 2015, from National Geographic Web Site : <http://environment.nationalgeographic.com/environment/greendex/>
- Rouf, A. (2011). Corporate characteristics, governance attributes and the extent of voluntary disclosure in Bangladesh. *African Journal of Business Management*, 5, 7836-7845.
- Rouf, M. A. (2011). The Corporate Social responsibility Disclosure: A Study of Listed Companies in Bangladesh. *Business and Economics Research Journal*, 2, 19-32.
- Setneg . (2007). *Kementerian Sekretariat Negara Republik Indonesia*. Retrieved August 2015, from Kementerian Sekretariat Negara Republik Indonesia Web Site: http://www.setneg.go.id/index.php?option=com_perundangan&id=1776&task=deta il&catid=1&Itemid=42&tahun=2007
- Sihombing, M. (2013, July 24). Kamus Ekonomi: Ini Pengertian Emerging Market. Jakarta, Jakarta, Indonesia.
- SSM ;. (2015, October). Company and Business Statistics for Year 2010. Kuala Lumpur, Malaysia.
- Sufian, M. A., & Zahan, M. (2013). Ownership Structure and Corporate Social Responsibility Disclosure in Bangladesh. *International Journal of Economics and Financial Issues*, 3, 901-909.
- Sugiyono. (2012). *Metode Penelitian Bisnis*. Bandung: Alfabeta.

- Supriyanto, B. (2014, 11 26). Program CSR, Penting Saat Perusahaan Bermasalah Dengan Masyarakat . Jakarta, Jakarta, Indonesia.
- Suttipun , & Stanton. (2012, May). Making or Not Making Environmental Disclosures in Thailand. *Making or Not Making Environmental Disclosures in Thailand*, 3.
- WFE. (2009, August). *Exchanges and Sustainable Investment* . Retrieved October 2015, from World Exchange Web Site: www.world-exchanges.org
- Williams, S. M. (1999). Voluntary environmental and social accounting disclosure practices in the Asia-Pacific region: An international empirical test of political economy theory. *The International Journal of Accounting Vol. 34 No. 2*, 209-238.
- Xiao, J. Z., Gao, S. S., Heravi, S., & Cheung, Y. Q. (2005). The impact of social and economic development on corporate social and environmental disclosure in Hong Kong and the U.K. *Advances in International Accounting Vol. 18*, 219-243.
- Zeng, S. X., Xu, X. D., Yin, H. T., & Tam, C. M. (2012). “Factors that drive Chinese listed companies in voluntary disclosure of environmental information. *Journal of Business Ethics Vol. 109 No. 3*, 309-321.
- Zhao, Katchova, & Barry. (2004, July). Testing the Pecking Order Theory and the Signaling Theory for Farm Businesses. *American Agricultural Economics*.